

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2021-2023**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Diploma IV (Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Anisah

40011421650225

**PROGRAM DIPLOMA IV AKUNTANSI PERPAJAKAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama Penyusun : Anisah

Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650225

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023

Semarang, 02 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Herry Laksito S.E., Ak., M. Adv. Acc

NIP. 196905061999031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anisah

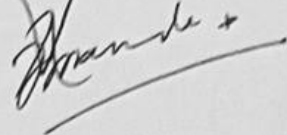
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650225

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 15 Juli 2025

Tim Penguji

1. Herry Laksito S.E.,Ak.,M.Adv.Acc. ()
2. Apip,SE.,M.Si. ()
3. Diva Ayu Imanda sari,SE.,M.AK. ()

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Anisah, menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul: **Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023**, yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 02 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Anisah

Nim 40011421651225

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of institutional ownership and firm size on tax avoidance among mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021–2023. The independent variables investigated in this research are institutional ownership and firm size, while the dependent variable is tax avoidance, which is measured using the Effective Tax Rate (ETR) ratio. A quantitative approach was employed, using multiple linear regression analysis. The data analyzed in this study are secondary data obtained from annual reports published on the official IDX website.

Based on the analysis results, the institutional ownership variable is proven to have a significant negative effect on tax avoidance. This indicates that institutional ownership tends to reduce a company's tendency to engage in tax avoidance, particularly by institutions such as investment firms or financial institutions. This condition shows that institutional investors can perform an effective monitoring function over management, thereby encouraging companies to be more compliant in fulfilling their tax obligations.

These findings are expected to provide useful insights for company management, stakeholders, and regulatory bodies in order to enhance monitoring effectiveness and develop more targeted tax policies, especially for the mining industry in Indonesia.

Keywords: Institutional Ownership, Firm Size, Tax Avoidance, Mining Sector, Indonesia Stock Exchange.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Variabel bebas pada penelitian ini meliputi kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel terikatnya adalah penghindaran pajak yang diukur melalui rasio *Effective Tax Rate* (ETR). Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang tersedia di situs resmi BEI.

Berdasarkan hasil analisis, variabel kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional cenderung menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak oleh lembaga seperti perusahaan investasi atau lembaga keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor institusional dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap manajemen, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, variabel ukuran perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, meskipun koefisien regresinya mengarah negatif. Demikian, besarnya aset atau skala operasi perusahaan saja belum cukup menjelaskan praktik penghindaran pajak tanpa mempertimbangkan faktor lain yang relevan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dalam memperkuat pengawasan dan merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, khususnya di sektor pertambangan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak, Sektor Pertambangan, Bursa Efek Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan di program studi Akuntansi Perpajakan

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan dukungan pada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suharnomo S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Apip S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Herry Laksito S.E.,Ak.,M.Adv.Acc., selaku Dosen Pembimbing dalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.

6. Bapak/ Ibu Dosen Sekolah Vokasi terutama Jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak Pelajaran kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
7. Kepada cinta pertama dan pintu surga, kedua orang tua penulis, Ayahku Heri dan Ibuku Asiati. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah habis. Meskipun ayah dan ibu tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun selalu mengusahakan memberikan anak perempuan pertama ini pendidikan terbaik. Dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu bangga karena telah menjadikan anak perempuannya ini menyandang gelar sarjana. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu sehat dan panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya di masa mendatang.
8. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya, pemilik Nrp 01060402. Terima kasih telah menjadi rumah, bagian dari perjalanan hidup penulis, atas kontribusi yang begitu besar baik tenaga maupun waktu. Sosok yang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat untuk terus maju atas apa yang selalu penulis impikan.
9. Teruntuk nenek yang sudah tenang di surga, dimana semasa hidup selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis atas apa yang telah penulis cita citakan.

10. Kepada sahabat masa kecil Zahro, terima kasih telah mendengarkan setiap keluh kesah penulis, waktu yang diberikan apabila penulis tidak baik baik saja dan terima kasih telah menjadi teman terbaik.
11. Sahabat saya shefi, andini, firda terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman saya selama di Semarang, Nadya, Anni, Nabhila, Rona, terima kasih selama empat tahun kebersamaian penulis, menjadi teman yang baik di perantauan, canda tawa, dan dukungan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Jangan asing meskipun kita tidak bareng lagi.
13. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah, selalu meyakinkan bahwa akan selalu bisa, menjadi anak perempuan yang selalu mengusahakan apa yang dia impikan. Anak perempuan yang dikenal dengan sifat keras kepala sudah mulai beranjak dewasa. Tetaplah bangga dan mensyukuri apa yang telah kamu dapatkan. Semoga langkah kaki kecilmu selalu kuat dan tidak pernah berhenti mengejar apa yang kamu inginka

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 <i>Teori Agency</i>	13
2.1.2 Kepemilikan Institusional	16
2.1.3 Ukuran Perusahaan.....	18
2.1.4 Penghindaran Pajak.....	19
2.1.5 Penelitian Terdahulu	21
2.2 Kerangka Pemikiran.....	26
2.3 Hipotesis.....	27
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak..	27
2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	29
3.2 Populasi dan Sampel	33

3.3	Jenis dan Sumber Data	34
3.4	Metode Pengumpulan Data	35
3.5	Metode Analisis	35
3.5.1	Statistik Deskriptif	35
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.3	Uji Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	42
4.2	Analisis Data	44
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif	44
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.2.3	Uji Hipotesis	51
4.3	Interpretasi Hasil	54
BAB V PENUTUP.....		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Keterbatasan.....	60
5.3	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot.....	47
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	47
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Kontribusi Pajak terhadap APBN Indonesia (2021–2023).....	2
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	29
Tabel 4. 1 Seleksi Sampel Perusahaan	43
Tabel 4. 2 Tabel Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov	46
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson	50
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Cochane-Orcutt	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Determinasi (R^2)	52
Tabel 4. 9 Hasil Uji Uji Simultan (Uji F).....	53
Tabel 4. 10 Hasil Uji Uji Parsial (Uji t).....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam sistem keuangan nasional, karena merupakan salah satu sumber penerimaan utama yang menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Secara umum, pajak dipahami sebagai iuran wajib masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faruq et al (2024), menjelaskan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mencapai pemerataan pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, peran pajak tidak hanya terbatas pada aspek fiskal, melainkan juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Di Indonesia, pajak memegang peran yang sangat penting dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini tidak lepas dari sistem *self-assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan nasional, di mana setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini dinilai memberikan kemudahan dan fleksibilitas, terutama bagi badan usaha, sehingga banyak digemari oleh kalangan perusahaan.

Namun, di balik fleksibilitas tersebut, muncul berbagai tantangan serius dalam pengawasan. Salah satunya adalah maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Meskipun *tax avoidance* tidak secara langsung melanggar hukum karena memanfaatkan celah-celah regulasi yang ada, praktik ini tetap merugikan negara karena menurunkan potensi penerimaan pajak. Jika dilakukan secara masif oleh perusahaan besar, termasuk sektor strategis seperti pertambangan, maka hal ini dapat menciptakan preseden negatif yang berdampak pada kepatuhan pajak secara nasional.

Pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan semakin nyata bila melihat data kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN. Dalam kurun waktu 2021–2023, penerimaan pajak konsisten menyumbang lebih dari setengah total pendapatan negara, bahkan mendekati 70% pada tahun 2023, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Kontribusi Pajak terhadap APBN Indonesia (2021–2023)

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp triliun)	Total Pendapatan Negara (Rp triliun)	Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara (%)
2021	± 1.230	± 1.912	± 64,3%
2022	1.716,8	2.635,8	65,2%
2023	1.869,2	2.774,3	67,4%

Menunjukkan bahwa keberlanjutan dan efektivitas pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendanaan utama, tetapi juga berfungsi sebagai alat redistribusi kesejahteraan dan pengendalian ekonomi. Dana dari sektor perpajakan dialokasikan untuk membiayai berbagai sektor esensial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, subsidi sosial, dan pembangunan infrastruktur nasional.

Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu indikator yang menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal adalah rendahnya rasio pajak (*tax ratio*). Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di kawasan ASEAN. Situasi ini terutama disebabkan oleh praktik penghindaran pajak, yaitu strategi hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah hukum dalam sistem perpajakan yang berlaku. Meskipun penghindaran pajak tidak secara tegas melanggar hukum, namun hal ini berdampak negatif pada pendapatan nasional dan sering dianggap sebagai bentuk pembangkangan moral terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, *tax avoidance* juga menciptakan ketimpangan dalam beban pajak antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak, serta berpotensi menurunkan kredibilitas sistem perpajakan secara menyeluruh.

Perlu diwaspadai bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan tambang masih menjadi persoalan serius dalam sistem perpajakan Indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor paling strategis dalam perekonomian nasional karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber

daya alam yang bernilai tinggi dan tidak terbarukan. Perusahaan tambang, baik milik swasta dalam negeri maupun asing, menguasai aset negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, secara ideal sektor ini seharusnya menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara, terutama melalui pajak.

Namun pada kenyataannya, kontribusi perpajakan dari sektor ini belum mencerminkan potensi sesungguhnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui berbagai skema, seperti manipulasi harga transfer (*transfer pricing*), underreporting keuntungan, hingga pemanfaatan celah hukum dan insentif fiskal secara agresif Maulina dan Faradisa (2021). Menurut penelitian oleh Rahmawati dan Nurfadilah (2023), sektor pertambangan tergolong dalam industri yang rawan terhadap praktik *aggressive tax planning* karena profitabilitas yang tinggi namun pengawasan yang masih lemah. Praktik penghindaran pajak ini berdampak pada menurunnya potensi penerimaan negara, serta berkontribusi pada ketimpangan beban pajak antarsektor.

Sektor pertambangan sendiri dikenal memiliki struktur bisnis yang cukup kompleks. Banyak pula perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri di negara-negara dengan tarif pajak rendah dan menggunakan mekanisme *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak mereka. Meskipun praktik ini belum tentu merupakan pelanggaran dari sudut pandang hukum, praktik ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang etika dan keadilan. Mengizinkan perusahaan untuk mengurangi pajak sambil mengutamakan keuntungan, kepercayaan publik terhadap perekonomian dan khususnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara dapat meningkat.

Melihat kenyataan tersebut, penting untuk menyelidiki lebih dalam faktor-faktor internal yang mendorong perusahaan pertambangan melakukan penghindaran pajak. Penelitian mengenai hal ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan di sektor pertambangan.

Memahami dinamika penghindaran pajak di lingkungan korporasi, diperlukan kajian terhadap karakteristik internal perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam menyusun strategi pajak. Dua variabel yang kerap menjadi fokus dalam berbagai penelitian sebelumnya adalah kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Kedua variabel ini diyakini berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional mencerminkan sejauh mana investor institusi terlibat dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berkaitan dengan kapasitas dan kompleksitas operasional yang dapat memengaruhi ruang gerak dalam merancang kebijakan perpajakan.

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga profesional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, atau reksa dana. Kehadiran investor institusional dalam struktur kepemilikan suatu perusahaan sering kali dikaitkan dengan peningkatan kualitas pengawasan terhadap tindakan manajerial. Menurut teori keagenan, terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik modal (prinsipal) yang dapat memicu tindakan penghindaran

pajak. Namun, pemegang saham institusional dianggap memiliki insentif serta kapasitas untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham jangka panjang.

Menurut teori keagenan, pemegang saham institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemilik modal. Hal ini, Ayu dan Sumadi (2019). Menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan Perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam studi ini turut memperkuat temuan tersebut. Berdasarkan uji t, berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak bersifat berlawanan arah, artinya semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Di sisi lain, ukuran perusahaan sering dianggap sebagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak, dengan asumsi bahwa perusahaan berskala besar memiliki lebih banyak sumber daya dan pengetahuan untuk melakukan strategi perencanaan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan hasil uji t, ukuran perusahaan baik dilihat

dari total aset maupun skala bisnis tidak secara langsung menentukan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

(Ratnasaria & Nuswantara, 2020). Mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak menunjukkan bahwa pengaruh tersebut mungkin bergantung pada konteks. Temuan yang beragam ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak tidak universal. Faktor-faktor lain seperti sektor industri, kondisi ekonomi makro, dan kebijakan internal perusahaan juga membentuk dinamika ini. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan variabel-variabel ini dalam konteks yang lebih spesifik diperlukan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 hingga 2023. Periode ini dipilih karena bertepatan dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana perusahaan mulai berupaya menstabilkan posisi operasional dan keuangannya. Meskipun situasi berangsur membaik, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk harga komoditas yang berfluktuasi dan tekanan untuk meningkatkan efisiensi. Situasi seperti itu, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangi beban biaya, termasuk penghindaran pajak.

Sektor pertambangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena sumber daya alamnya yang melimpah dan strategis. Sektor ini tidak hanya menghasilkan pendapatan melalui pajak dan royalti, tetapi juga mendorong ekspor

dan lapangan kerja. Oleh karena itu, perilaku perpajakan perusahaan pertambangan menjadi perhatian, terutama jika ada bukti penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Contoh perusahaan pertambangan yang dapat dikenai investigasi antara lain PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, dan PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan-perusahaan ini besar dan memiliki struktur kepemilikan yang beragam, termasuk kepemilikan institusional, yang dapat memengaruhi keputusan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah kepemilikan saham institusional dan ukuran perusahaan memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan pertambangan. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memajukan pengetahuan akademis dan mendorong peningkatan pengawasan pajak yang lebih efektif di sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sejauh ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengendalian tingkat penghindaran pajak pada Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023?

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2023.
2. Menganalisa pengaruh kepemilikan institusional dalam mendorong transparansi dan kepatuhan perpajakan di lingkungan perusahaan sektor pertambangan.
3. Menganalisa pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan akademis, khususnya di bidang akuntansi, tata kelola perusahaan, dan perpajakan. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap perilaku pajak perusahaan, khususnya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang berharga bagi teori-teori perkembangan yang terkait dengan tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan strategis di perusahaan serta memberikan bukti empiris yang relevan dalam konteks perusahaan milik negara di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

B. Secara praktis

Penelitian ini menawarkan berbagai masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam memantau dan mengendalikan praktik penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan.
2. Perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusinya terhadap negara.

3. Untuk investor institusional, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam mengawasi praktik manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, demi mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas.
4. Penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi para peneliti di masa mendatang untuk menyelidiki lebih dalam hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan pajak perusahaan di berbagai industri.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing berisi catatan penjelasan singkat. Penulisan ini menggunakan metode sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca. Uraian tersebut meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan gambaran empiris dan teoritis, pembahasan kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional masing-masing variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil temuan penelitian serta analisis yang menjadi fokus dalam pembahasan, termasuk penyajian hasil pengolahan data, analisis, dan interpretasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, uraian mengenai batasan yang ditemui selama proses penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Teori Agency*

Teori prinsipal-agen menjelaskan hubungan antara dua pihak dengan kepentingan yang berbeda, yaitu prinsipal (pemilik modal atau pemegang saham) dan agen (manajer atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan). Dalam praktik bisnis, pemilik Perusahaan menyerahkan pengelolaan operasional kepada manajer dengan harapan bahwa manajer akan bertindak demi kepentingan perusahaan. Namun, kenyataannya, manajer bisa saja mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada kepentingan pemilik. Situasi ini dikenal sebagai konflik keagenan (*agency conflict*) (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah agensi muncul ketika manajemen (agen) bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi yang dapat berbeda dari tujuan pemegang saham (prinsipal). Meskipun agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan demi keuntungan pemegang saham, agen terkadang lebih fokus pada keuntungan pribadi, seperti mengurangi risiko pribadi, meningkatkan kompensasi, atau mengejar keuntungan jangka pendek yang tidak selalu selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Sebagai contoh, seorang manajer yang memilih untuk menghindari pajak demi meningkatkan laba bersih dalam jangka pendek, meskipun

langkah tersebut berisiko merusak citra perusahaan atau berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan perusahaan di masa depan.

Ketidakseimbangan informasi juga merupakan masalah utama dalam hubungan agensi. Pemegang saham sering kali tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk mengawasi keputusan yang diambil oleh agen secara efektif, yang membuka peluang bagi agen untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, di mana pemegang saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, semakin memperburuk masalah ini. Akibatnya, prinsip-agensi dapat mengarah pada peningkatan biaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa agen bertindak dalam kepentingan principal (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah ini dapat menyebabkan berbagai kendala dalam manajemen perusahaan, seperti penghindaran pajak yang tidak sah, penyalahgunaan sumber daya perusahaan, atau keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi agen daripada kepentingan perusahaan. Seiring waktu, hal ini dapat merugikan nilai perusahaan, berdampak negatif pada pemegang saham, dan menurunkan daya saing perusahaan di pasar Fama dan Jensen (1983). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif serta memberikan insentif yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal.

(Jensen & Meckling, 1976), juga menyoroti bahwa masalah agensi dapat menimbulkan biaya yang dikenal dengan biaya agensi, yang terbagi menjadi dua kategori utama: biaya pengawasan dan biaya insentif. Biaya pengawasan mencakup

biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memantau dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Sementara itu, biaya insentif adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan motivasi yang dapat mendorong agen agar bertindak demi kepentingan prinsipal, seperti kompensasi berbasis kinerja atau pemberian opsi saham.

Selain itu, dalam teori agensi, biaya agensi juga mencakup kerugian yang muncul akibat agen mengambil keputusan yang tidak menguntungkan perusahaan, seperti penghindaran pajak yang berisiko menurunkan reputasi perusahaan atau menimbulkan masalah hukum yang lebih besar. Teori agensi pun menyarankan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan pengawasan dengan melibatkan dewan komisaris, audit eksternal, atau pemegang saham institusional untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan manajerial.

Secara keseluruhan, teori agensi menggarisbawahi pentingnya hubungan yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan dapat menyebabkan pengelolaan perusahaan yang tidak efisien dan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Oleh karena itu, perusahaan harus mengimplementasikan strategi pengawasan yang tepat dan insentif yang sesuai untuk memastikan agen bertindak dalam kepentingan jangka panjang pemegang saham.

2.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, atau perusahaan investasi lainnya. Bentuk kepemilikan ini memainkan peran penting dalam struktur pengendalian perusahaan, karena lembaga ini memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memantau dan memengaruhi keputusan manajemen secara signifikan.

Berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh, Jensen dan Meckling (1976). Hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) dapat menimbulkan konflik kepentingan. Situasi ini muncul karena manajer kemungkinan besar akan bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya, yang mungkin tidak selaras dengan tujuan para pemilik perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu meminimalkan konflik tersebut karena institusi sebagai investor besar cenderung aktif dalam mengawasi jalannya perusahaan dan keputusan yang diambil oleh manajemen (Siregar et al., 2005).

Lebih lanjut, kepemilikan institusional dipandang sebagai alat pengawasan internal yang efektif. Lembaga-lembaga ini memiliki kepentingan jangka panjang dan kemampuan analitis yang memungkinkan mereka untuk mengawasi kinerja perusahaan dengan lebih cermat. Penelitian oleh Darmawan Putra (2018), menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu

perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh positif terhadap peningkatan nilai dan kinerja perusahaan.

Di sisi lain, kepemilikan institusional juga berperan dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini karena pemilik institusional memiliki kepentingan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis. Studi yang dilakukan oleh Nandahayu dan Agus wahyudi (2024), menyatakan bahwa institusi keuangan cenderung mendukung kebijakan perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang, sehingga dapat mengurangi praktik manajerial yang merugikan.

Hasil studi oleh (Sudjinan et al., 2024), mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, besarnya kepemilikan institusional tidak selalu berkorelasi secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini bisa terjadi jika institusi tidak aktif terlibat dalam pengambilan keputusan atau jika struktur kepemilikan terlalu terkonsentrasi hingga melemahkan fungsi pengawasan eksternal.

Konteks perusahaan sektor pertambangan, peran kepemilikan institusional menjadi sangat penting. Keterlibatan institusi dalam struktur pemegang saham sektor pertambangan dapat berfungsi sebagai pengawas yang objektif terhadap intervensi pihak eksternal seperti pemerintah atau aktor politik. Dengan demikian, kehadiran institusi ini dapat menjadi faktor penyeimbang yang meningkatkan efisiensi tata kelola dan mendukung pencapaian tujuan korporasi.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian ekonomi dan manajemen yang menggambarkan kapasitas serta skala operasional suatu perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2018), Besaran suatu perusahaan dapat diidentifikasi melalui indikator seperti jumlah total penjualan atau total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih banyak, sehingga mampu memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Selain itu, ukuran perusahaan juga berhubungan erat dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perusahaan besar lebih mampu mengatasi fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Menurut teori keagenan, besar kecilnya perusahaan ikut serta dalam membentuk hubungan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Perusahaan besar cenderung memerlukan pengawasan dan manajemen yang lebih intensif untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya keuangan, sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih strategis. Penelitian yang dilakukan oleh Novari dan Lestari (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak terhadap nilai perusahaan, terutama di sektor real estat Indonesia, di mana perusahaan besar dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan memperoleh pembiayaan dengan biaya lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan..

Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan yang diterapkan. Perusahaan besar memiliki kemampuan lebih besar untuk memanfaatkan celah hukum dan kebijakan perpajakan, sehingga dapat mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak yang lebih canggih.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayar kepada pemerintah dengan menggunakan metode yang mematuhi undang-undang yang berlaku. Tidak seperti penghindaran pajak ilegal, penghindaran pajak memanfaatkan celah atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan. Meski tidak melanggar hukum, praktik ini kerap dianggap tidak etis karena berpotensi mengurangi pemasukan negara. Sebuah teori yang relevan untuk digunakan dalam konteks ini adalah untuk menjelaskan penghindaran pajak adalah teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajer (*agen*) bisa mendorong manajer mengambil keputusan yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri, seperti menghindari pajak demi meningkatkan laba perusahaan dan bonus pribadi. Namun, keputusan tersebut bisa merugikan pemilik dalam jangka panjang. Penelitian Ma'sum et al (2023), menunjukkan bahwa perusahaan yang cenderung menghindari pajak sering kali menyajikan informasi yang tidak transparan dalam laporan tahunan mereka.

Dalam teori keagenan, praktik penghindaran pajak dapat dipandang sebagai suatu bentuk perilaku memanfaatkan situasi yang dilakukan oleh manajer (*agen*) yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan (*prinsipal*).

Ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak memungkinkan manajer untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak, yang meskipun sah, sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian (Ma'sum et al., 2023) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada umumnya menyajikan laporan tahunan yang kurang transparan, terutama pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan kebijakan perpajakan dari para pemangku kepentingan. Namun, peran dewan komisaris independen terbukti efektif dalam meningkatkan pengawasan dan mengurangi kecenderungan manajemen untuk memanipulasi informasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian Ramdan Mustofa dan Mabrur (2022) menggambarkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung signifikan untuk menghasilkan laporan tahunan yang kurang transparan atau sulit dipahami.. Rendahnya keterbacaan laporan ini diduga sebagai strategi manajemen untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak agar tidak mudah terdeteksi.

Sementara itu, (Mangoting et al., 2019) menekankan pentingnya transparansi informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan yang terbuka dan jujur dalam pelaporan CSR cenderung terhindar dari praktik penghindaran pajak karena lebih bertanggung jawab kepada publik.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	2024	Yolanda Pratami & Andika Pratama Putra	Variabel Independen: Profitabilitas, Laverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap	2024	Misyakatul Munirah	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional.	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022)			Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	terhadap penghindaran pajak
3.	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , Ukuran Perusahaan, Dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	2022	Shoby Husnul Waliday ni	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , Ukuran Perusahaan, Proporsi Kepemilikan Manajerial, Proporsi Kepemilikan Institusional.	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
				Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	
4.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Tranfer Princing</i> , Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak	2023	Dinda Arliani Yohanes	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, <i>Transfer Pricing</i> , Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Return on Asset, dan Leverage. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak

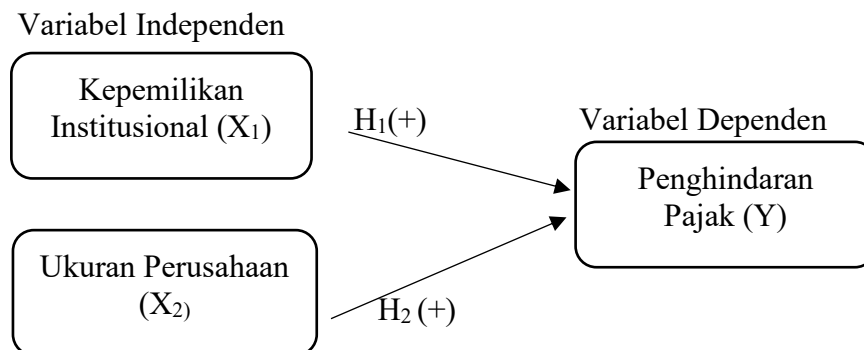
No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	2022	Bramanti yo Sonny Sadewa	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, <i>Transfer Pricing</i> , Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Return on Asset, dan Leverage. Variabel Deependen: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
6.	Kepemilikan Institusional Terhadap	2021	Rizki Afrika	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional.	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Penghindaran Pajak			Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	terhadap Penghindaran Pajak
7.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur	2022	Made Priska Adella	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional Berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 2.1 ringkasan penelitian terdahulu yang telah disusun memberikan manfaat penting bagi penelitian ini. Tabel tersebut menjadi acuan untuk memahami bagaimana variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan telah diteliti sebelumnya terkait penghindaran pajak. Selain itu, perbedaan hasil penelitian yang ditemukan, baik yang menunjukkan adanya pengaruh maupun yang tidak, membantu penulis menemukan celah penelitian yang masih perlu ditelaah lebih lanjut. Fokus penelitian ini diarahkan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2023. Kajian penelitian sebelumnya juga memperkuat dasar teori serta mendukung penulis dalam merumuskan hipotesis penelitian. Tabel ini memudahkan penulis dalam menentukan variabel, indikator, dan metode analisis yang sesuai dengan penelitian relevan, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dibandingkan dan dijadikan bahan diskusi. Melalui kajian ini, penulis dapat menunjukkan bahwa penelitian memiliki unsur kebaruan karena fokus pada sektor pertambangan dengan periode terbaru, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, diperlukan data laporan keuangan tentang kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Dari uraian di atas dapat disusun Kerangka konsep yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional mengacu pada porsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau agensi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau investor profesional lainnya. Menurut teori principal-agent, kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam menghindari potensi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai principal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Dalam beberapa kasus, pemilik institusional justru memiliki kecenderungan untuk mendorong perusahaan mengoptimalkan laba dengan cara menekan beban pajak, termasuk melalui penghindaran pajak.

Misalnya, penelitian oleh Ratnasaria dan Nuswantara (2020) menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, pemegang saham institusional dapat bersikap pasif terhadap kebijakan manajemen, termasuk strategi pajak, selama hasil akhirnya memberikan keuntungan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua investor institusional memiliki kepentingan terhadap kepatuhan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H₁ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori prinsipal-agen, konflik kepentingan sering muncul dalam hubungan antara pemilik pihak perusahaan yang berperan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen terutama dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, termasuk perpajakan. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan pengawasan yang lebih komprehensif, sehingga meningkatkan kemungkinan kontinuitas informasi yang lebih besar antara manajer dan pemilik. Situasi ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan mereka, seperti penghindaran pajak dan langkah-langkah efisiensi keuangan untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, teori principal-agent mengasumsikan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak dengan memengaruhi sistem pengendalian internal dan pemantauan eksternal.

(Lanis & Richardson, 2012), perusahaan yang memiliki total aset lebih besar cenderung menunjukkan rasio efektivitas pajak yang lebih rendah, yang dapat menjadi indikasi adanya aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap kecenderungan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metodologi penelitian menjelaskan sifat penelitian yang digunakan dalam studi ini. Bab ini juga memberikan deskripsi terperinci mencakup penjabaran variabel, definisi variabel, populasi dan sampel studi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel secara terstruktur.

3.1 Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, definisi kerja untuk setiap variabel yang dianalisis disediakan di bawah ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terperinci tentang bagaimana setiap variabel diukur dan ditafsirkan untuk menghindari inkonsistensi dan kesalahpahaman saat melakukan penelitian. Tiga variabel utama yang disertakan dalam penelitian ini adalah: penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Masing-masing variabel ini memiliki indikator dan metode pengukuran yang jelas.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Rumus
1.	Penghindaran Pajak(Y)	Penghindaran pajak adalah metode yang digunakan perusahaan untuk memanfaatkan celah dan kelemahan	

No	Variabel	Definisi	Rumus
		dalam sistem pajak saat ini guna mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan secara sah (Slemrod et al., 1992). Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pajak yang memungkinkan mereka mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). ETR digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan total laba sebelum pajaknya untuk periode tertentu. Sederhananya, ETR merupakan persentase laba perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.	$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$
2.	Kepemilikan Institusional (X1)	Kepemilikan saham institusional mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional	

No	Variabel	Definisi	Rumus
		seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan manajemen investasi. Lembaga-lembaga ini umumnya memiliki kemampuan lebih besar untuk memantau tata kelola perusahaan dan memengaruhi an manajemen. Oleh karena itu, kepemilikan institusional sering dianggap sebagai bentuk pemantauan eksternal yang efektif, yang mengarah pada tata kelola perusahaan yang lebih kuat dan akuntabilitas manajemen yang lebih besar (Jensen & Meckling, 2012). Untuk mengukur proporsi saham institusional dalam suatu perusahaan, digunakan perhitungan persentase yang membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah total saham yang diterbitkan.	INST= $\frac{\text{total saham inst}}{\text{jmlh saham beredar}}$

No	Variabel	Definisi	Rumus
3.	Ukuran Perusahaan (X2)	Ukuran perusahaan mengacu pada ukuran perusahaan dan dapat memengaruhi keputusan, termasuk kebijakan pajak yang berlaku. Umumnya, perusahaan yang lebih besar memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, dan lebih banyak sumber daya dan kapasitas manajemen daripada perusahaan yang lebih kecil. Dari perspektif penghindaran pajak, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak pilihan dan kemampuan untuk mengembangkan strategi pajak yang lebih efisien. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural (ln) dari total aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Penggunaan logaritma dimaksudkan untuk mengurangi dampak perbedaan besar antara perusahaan dan menormalkan data untuk analisis yang lebih baik. Total aset mencakup semua	<i>Ukuran perusahaan:</i> <i>Ln (Total Aset)</i>

No	Variabel	Definisi	Rumus
		aset yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode pelaporan.	

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini fokus pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023. Kelompok sasaran ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa perusahaan sektor pertambangan memiliki karakteristik terkait kepemilikan, tata kelola, dan kewajiban perpajakan yang menjadikannya cocok untuk dijadikan subjek penelitian dalam konteks penghindaran pajak.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengambilan sampel ini didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Adapun kriteria yang diterapkan dalam proses pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan merupakan Perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap dan dapat diakses setiap tahun selama periode penelitian.

3. Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023.
4. Perusahaan Pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah dalam melaporkan laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2021-2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif. Artinya, data tersebut bersumber dari angka atau informasi numerik yang sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Peneliti tidak mengumpulkan data tersebut secara langsung dari responden. Data tersebut digunakan karena penelitian ini bersifat kuantitatif dan memerlukan data yang dapat diolah dengan metode statistik untuk menganalisis pengaruh antar variabel.

Data yang dikumpulkan antara lain adalah informasi keuangan perusahaan, seperti beban pajak saat ini, laba sebelum pajak, total aset, dan proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga. Data tersebut dikumpulkan selama periode 2021–2023, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan mencerminkan situasi terkini selama tiga tahun terakhir.

Sumber data penelitian ini berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit, yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang tercatat di BEI. Peneliti mengakses data tersebut dari situs web resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mengakses dan mengumpulkan data sekunder yang tersedia untuk umum. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 sampai dengan 2023.

Sumber data diperoleh dari situs web resmi BEI dan situs web resmi perusahaan milik negara. Proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur. Pertama, perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dipilih. Kemudian, data yang relevan diunduh dan dicatat.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran awal tentang karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami menerapkan analisis kami pada tiga variabel utama: kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Data dianalisis menggunakan indeks statistik seperti minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar.

Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memahami pola distribusi data untuk setiap variabel. Misalnya, kami dapat mengidentifikasi berbagai tingkat penghindaran pajak menggunakan indikator seperti tingkat rata-rata kepemilikan

institusional perusahaan milik negara, ukuran perusahaan rata-rata berdasarkan logaritma natural dari total aset, dan tarif pajak efektif (ETR).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Saat menganalisis data menggunakan regresi linier, data harus memenuhi beberapa syarat agar hasilnya dapat diandalkan dan valid. Syarat-syarat ini disebut sebagai "asumsi klasik." Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil regresi yang dihasilkan mungkin tidak akurat atau bias. Sebelum melakukan analisis regresi, diperlukan pengujian terhadap empat asumsi klasik berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memeriksa apakah data "yang tersisa" (disebut residual), perbedaan antara hasil prediksi dan nilai asli dalam analisis regresi, terdistribusi normal. Hal ini penting karena banyak uji statistik, seperti uji-t dan uji-F, hanya dapat digunakan jika data residual terdistribusi normal. Jika data residual tidak terdistribusi normal, hasilnya mungkin bias atau kesimpulannya mungkin salah.

Hal ini karena jika data residual tidak terdistribusi normal, model regresi yang dibuat mungkin tidak mencerminkan situasi sebenarnya.

1. Uji ini akan menghasilkan angka yang disebut p-value.
2. Jika nilai $p > 0,05$, maka data dianggap normal (tidak ada masalah).
3. Tapi jika nilai $p < 0,05$, maka data tidak normal, dan mungkin perlu diubah atau ditransformasi.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah ada dua atau lebih variabel independen (variabel X) yang sangat berkorelasi satu sama lain. Jika hubungan antara variabel independen terlalu kuat, mungkin sulit untuk menentukan variabel mana yang benar-benar berpengaruh. Hal ini membuat hasil regresi membingungkan, tidak stabil, dan sulit ditafsirkan.

1. Gunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)
2. VIF adalah angka yang menunjukkan sejauh mana satu variabel independen "dipengaruhi" oleh variabel independen lainnya.
3. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 berarti ada masalah dengan multikolinearitas (hubungannya terlalu kuat).

Tunjukkan toleransi

1. Toleransi ini adalah kebalikan dari VIF.
2. Nilai toleransi kurang dari 0,1 berarti ada bukti kuat bahwa variabel independen mungkin berlebihan atau sangat berkorelasi.

Ketika multikolinearitas hadir, model regresi menjadi tidak akurat karena menjadi sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang efek setiap variabel. Oleh karena itu, pengujian ini penting untuk menentukan apakah semua variabel dapat digunakan bersama dalam model tanpa saling mengganggu.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memeriksa apakah nilai kesalahan (residual) dari suatu model regresi terdistribusi secara merata. Kesalahan/residual adalah selisih antara

nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Dalam analisis regresi yang baik, kesalahan harus terdistribusi secara merata (disebut homoskedastisitas). Namun, jika kesalahan terdistribusi secara tidak merata atau bervariasi (misalnya, jika proporsi tertentu meningkat atau menurun), ini disebut heteroskedastisitas dan dapat mendistorsi hasil analisis regresi.

1. Jika titik-titik terdistribusi secara acak dan tidak membentuk pola (tidak ada heteroskedastisitas).
2. Namun, jika titik-titik membentuk pola tertentu (misalnya, sektor, segitiga, atau bentuk kerucut), heteroskedastisitas mungkin ada.

Uji heteroskedastisitas penting untuk memastikan bahwa model regresi tidak mengandung kesalahan distribusi data yang dapat menyebabkan hasil analisis yang menyesatkan. Jika Anda menghadapi masalah, Anda biasanya dapat menyelesaikannya dengan mengubah data atau mengubah model.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dapat digunakan untuk menentukan apakah ada pola atau hubungan berulang dalam kesalahan (residual) dari satu item data ke item data lainnya. Autokorelasi umum terjadi dalam data deret waktu (tahunan, bulanan, harian, dsb).

Autokorelasi mengurangi efisiensi model regresi. Bahkan jika hasil analisis terlihat "baik", sebenarnya tidak demikian. Autokorelasi dapat terjadi secara teratur, terutama ketika periode data tidak pasti, seperti pada data dari laporan keuangan tahunan.

Metode Uji Autokorelasi :

Durbin-Watson (DW) Test

Paling umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi orde pertama.

1. Nilai DW mendekati 2 → tidak ada autokorelasi
2. Nilai DW < 2 → kemungkinan ada autokorelasi positif
3. Nilai DW > 2 → kemungkinan ada autokorelasi negatif

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode regresi linier berganda digunakan dalam analisis statistik untuk mengetahui sejauh mana lebih dari satu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat melalui hubungan yang bersifat linier. Metode ini membantu menilai sejauh mana masing-masing faktor independen memberikan kontribusi terhadap perubahan nilai variabel dependen.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

- Y = variabel yang dipengaruhi (dependen)
- a = nilai konstanta atau intercept
- $b_1, b_2, \dots$ = Koefisien regresi merepresentasikan arah hubungan serta besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen
- $X_1, X_2, \dots$ = variabel bebas yang memengaruhi Y

3.5.3.2 Analisis Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Uji ini membantu untuk menilai kecocokan model dalam menggambarkan hubungan antar variabel.

Interpretasi Nilai R^2

1. $R^2 = 0$: Model tidak dapat menjelaskan variasi data sama sekali, artinya data sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.
2. $R^2 = 1$: Model sangat sempurna dalam menjelaskan seluruh variasi data.
3. $0 < R^2 < 1$: Model mampu menjelaskan sebagian variasi data. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan model yang semakin baik.

3.5.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan, atau uji F, adalah metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen dalam model regresi memengaruhi variabel dependen secara setara. Tujuan dari uji ini adalah untuk memulai apakah model regresi yang diterapkan layak dan tepat digunakan.

Uji F untuk menguji hipotesis bahwa semua koefisien regresi dalam model adalah nol. Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F: Hipotesis nol (H_0): Semua koefisien regresi dari variabel independen adalah nol. Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Hipotesis Alternatif (H_1): Setidaknya ada satu koefisien regresi yang tidak nol, yang berarti ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.3.4 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji-t) merupakan salah satu metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel, jika diambil secara terpisah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Tidak seperti uji-F yang mengevaluasi pengaruh variabel secara bersamaan, uji-t lebih berfokus pada pengujian masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat dalam model regresi.

Tujuan uji-t adalah untuk menguji apakah nilai koefisien regresi (β) masing-masing variabel bebas secara statistik berbeda dari nol. Jika terdapat perbedaan, variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan sektor pertambangan yang tercatat sebagai emiten di BEI pada kurun waktu 2021 sampai 2023. Sektor pertambangan dipilih karena memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, namun sering menjadi sasaran penghindaran pajak. Sektor pertambangan juga memiliki karakteristik bisnis dan struktur modal yang unik dibandingkan dengan sektor lainnya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah kriteria sampel:

1. Perusahaan merupakan Perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap dan dapat diakses setiap tahun selama periode penelitian.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023.
4. Perusahaan Pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah dalam melaporkan laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2021-2023.

Tabel 4. 1 Seleksi Sampel Perusahaan

No	Kriteria Perusahaan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI tahun 2021-2023.	65
2.	Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap dan dapat diakses setiap tahun selama periode penelitian.	(17)
3.	Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian selama periode 2021-2023.	(4)
4.	Perusahaan Pertambangan yang menggunakan mata uang dalam melaporkan laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2021-2023.	(29)
Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel		15
Rentang tahun penelitian 2021-2023		3
Jumlah Data Penelitian		45

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah perusahaan yang telah didapat setelah melakukan seleksi sampel adalah dengan jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan dan periode pengamatan selama 3 tahun, maka total data yang dianalisis berjumlah 45.

4.2 Analisis Data

Bagian analisis data memaparkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan program SPSS. Analisis ini meliputi empat komponen utama, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan representasi yang komprehensif dari variabel yang dipelajari yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Tabel 4.1 menyajikan hasil statistik deskriptif:

Tabel 4. 2 Tabel Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	45	.10	.98	.6665	.21798
Ukuran Perusahaan	45	25.00	31.00	28.2667	1.40454
Penghindaran Pajak	45	.00	.61	.2252	.14996
Valid N (listwise)	45				

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa hasil uji statistic deskriptif diperoleh dari 45 sampel penelitian. Dari uji ini menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak (ETR)

sebagai variabel dependen menghasilkan nilai minimum yakni 0,00 yang diperoleh PT Timah Tbk pada tahun 2023, dan nilai maksimum 0,61 yang diperoleh PT Central Omega Resources Tbk pada tahun 2022. Nilai rata rata ETR sebesar 0,2252 dan nilai standar devisinya adalah 0,14996.

Variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki nilai minimum sebesar 0,10 yang tercatat pada PT Kapuas Prima Coal Tbk pada tahun 2023. Nilai maksimum sebesar 0,98 dicapai pada tahun yang sama oleh PT Golden Eagle Energy Tbk. Nilai INST rata-rata sebesar 0,6665 dengan standar deviasi sebesar 0,21789.

Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25.00 diperoleh dari PT Sigma Energy Compressindo Tbk pada tahun 2021, sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 31.00 diperoleh dari PT Aneka Tambang Tbk pada tiga tahun penelitian. Nilai rata rata 28.2667 dan nilai standart devisinya adalah 1.40454.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

1. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14283967
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.079
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 ^c

a. Test distribution is Normal.

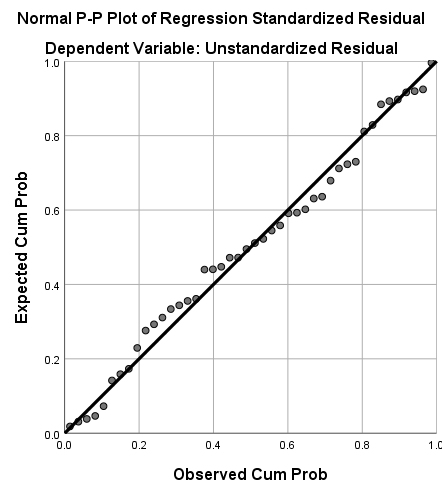
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

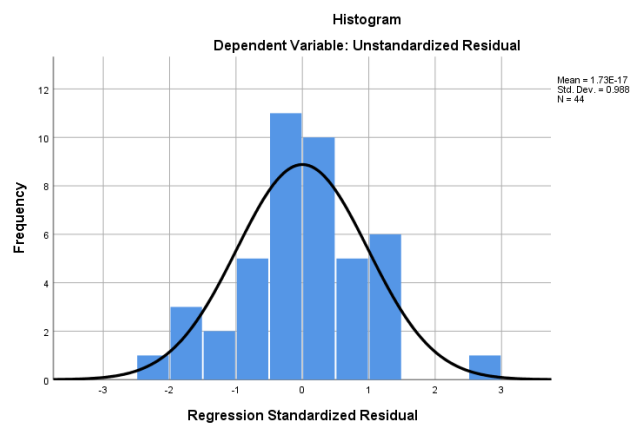
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan One-Sample Kolmogorov-Smirnov terhadap residu regresi. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,093, yang lebih besar dari ambang batas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi ini berdistribusi normal.

2. Uji Normalitas dengan P-Plot of Regression Standardized Residual dan Histogram

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot



Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram



Selain uji Kolmogorov-Smirnov, pengujian normalitas juga dapat diverifikasi dengan memeriksa plot residual terstandarisasi regresi P-plot dan histogram residual. Hal ini memungkinkan distribusi data diamati berdasarkan distribusi titik residual dalam plot. Jika titik-titik tersebut terpusat dan mengikuti diagonal, ini menunjukkan distribusi normal data residual. Hal ini dapat dilihat pada

Gambar 4.1, di mana pola distribusi titik cenderung berada di sepanjang diagonal. Sebaliknya, jika pola titik menyimpang secara signifikan dari diagonal dan tidak membentuk pola yang teratur, data tersebut dianggap abnormal. Berdasarkan Gambar 4.2, histogram menunjukkan bentuk menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped*) dan tidak terdapat kemiringan ke kanan maupun ke kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikonieritas

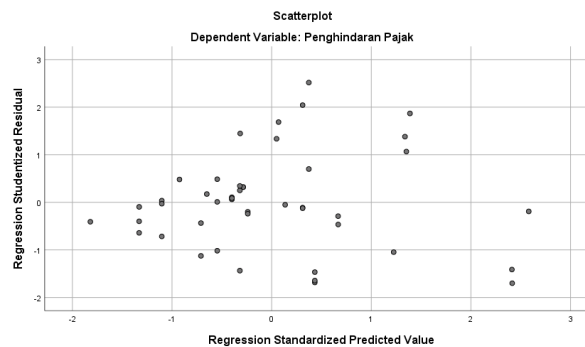
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Institusional	.967	1.034
	Ukuran Perusahaan	.967	1.034

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji multikonieritas, nilai tolerance pada masing masing variabel menunjukkan anhkha yang lebih 0,10 ($>0,10$) yaitu Kepemilikan Perusahaan sebesar 0,967, Ukuran Perusahaan sebesar 0,967. Hal tersebut berarti bahwa model regrensi tidak mengalami multikonielitas. Sedangkan dalam nilai VIF menunjukkan angka dari variabel Kepemilikan Institusional sebesar 1,034, nilai dari Ukuran Perusahaan sebesar 1,034 yang artinya angkat tersebut kurang dari 10,00 ($<10,00$). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, hal tersebut mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas dalam model.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas, yaitu perbedaan varians residual antar data observasi. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik residual terdistribusi secara acak dan tidak membentuk pola sistematis, yang menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. Sebaliknya, apabila sebaran titik menunjukkan pola tertentu misalnya semakin melebar atau menyempit maka hal tersebut dapat menandakan adanya masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, dari pola scatterplot yang acak dan tidak teratur tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah sesuai dan memenuhi syarat varian residual yang konstan.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.304 ^a	.093	.049	.14620	.723

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini, autokorelasi diuji menggunakan statistik Durbin-Watson. Hasil pengujian awal menunjukkan nilai 0,723, yang jauh di bawah nilai ideal 2 dan menunjukkan autokorelasi positif dalam model residual.

Mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan perbaikan model dengan menerapkan metode Cochrane-Orcutt. Metode ini digunakan untuk mengoreksi autokorelasi dengan cara meregresi data dalam bentuk transformasi lag.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Cochrane-Orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.343 ^a	.118	.075	.11367	1.859

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Setelah model diperbaiki dengan pendekatan ini, nilai Durbin-Watson meningkat menjadi 1,859, yang mendekati nilai ideal yaitu 2. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa autokorelasi dalam model sudah berhasil diatasi dan asumsi bebas autokorelasi terpenuhi. Hal ini memastikan bahwa hasil estimasi koefisien dan pengujian hipotesis dapat dipercaya.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.209	.189		1.109	.274
	Kepemilikan Institusional	-.244	.104	-.349	-2.341	.024
	Ukuran Perusahaan	-.006	.018	-.054	-.364	.718

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hasil uji regresi linier berganda nilai konstanta diperoleh sebesar 0,209. Penghindaran pajak bernilai 0,209 jika masing masing variabel kepemilikan institusional (X1), ukuran perusahaan (X2), bernilai sama dengan 0.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel “Kepemilikan Institusional” (INST) sebesar 0,244 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit pada variabel

INST akan menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,244. Di dalam tabel menunjukkan nilai koefisien kepemilikan institusional negatif sehingga berpotensi menurunkan penghindaran pajak.

3. Nilai koefisien dari variabel ukuran Perusahaan menunjukkan angka 0,006. Hal ini diartikan bahwa saat terjadi kenaikan 1 variabel ukuran Perusahaan maka terjadi penurunan penghindaran pajak sebesar 0,006. Di dalam tabel menunjukkan nilai koefisien ukuran perusahaan negatif sehingga berpotensi menurunkan penghindaran pajak.

4.2.3.2 Uji Analisis Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.343 ^a	.118	.075	.11367	1.859

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode Cochrane-Orcutt diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,075. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independen (kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak) adalah sebesar 0,75%, sedangkan sisanya sebesar 92,25% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

4.2.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.071	2	.035	2.741	.076 ^b
	Residual	.530	41	.013		
	Total	.601	43			

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

Berdasarkan uji F yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,076. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.2.3.4 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.209	.189		1.109
	Kepemilikan Institusional	-.244	.104	-.349	2.341
	Ukuran Perusahaan	-.006	.018	-.054	.364

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat diasumsikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,718 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang diteliti. Meskipun koefisiennya negatif, pengaruhnya tidak dapat dibuktikan secara statistik.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, khususnya apakah keberadaan investor institusional dapat menekan praktik penghindaran pajak di perusahaan. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021–2023. Koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa arah pengaruhnya berlawanan, sehingga semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, semakin rendah pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan kerap melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk menekan beban fiskal dan meningkatkan laba bersih. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengurangi kecenderungan tersebut. Temuan ini mendukung teori agensi yang

menjelaskan bahwa keberadaan pemegang saham institusional dapat menjadi sarana pengawasan eksternal yang efektif dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal. Investor institusional, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun reksa dana, cenderung memiliki fokus jangka panjang terhadap stabilitas dan kinerja perusahaan, sehingga mereka berupaya memastikan agar perusahaan dikelola secara etis dan sesuai peraturan.

Keberadaan pemegang saham institusional mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal perpajakan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusional memberikan tekanan kepada manajemen untuk menghindari praktik-praktik berisiko seperti penghindaran pajak, karena praktik-praktik tersebut dapat merusak reputasi perusahaan atau berujung pada sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi pemegang saham institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aulia Rachma (2025) menurutnya, perusahaan properti di Indonesia dan menunjukkan bahwa tingginya proporsi pemegang saham institusional turut berkontribusi dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hal senada juga ditemukan oleh Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha (2021) pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Juga menemukan temuan serupa pada perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitiannya, mereka menjelaskan bahwa pemegang saham institusional terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak karena berperan

sebagai aktor yang memastikan kepatuhan manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik.

4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Di sisi lain, berdasarkan hasil uji t, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,718, yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Dengan kata lain, besarnya total aset maupun skala bisnis suatu perusahaan tidak secara langsung menentukan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak.

Dalam teori, perusahaan berskala besar biasanya memiliki sumber daya yang memadai untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan baik. Selain itu, perusahaan besar juga umumnya mendapat pengawasan ketat dari regulator, auditor eksternal, maupun investor publik, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan pajaknya lebih tinggi. Namun, temuan pada penelitian ini justru menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjadi jaminan kepatuhan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Melia Wida (2023) yang meneliti perusahaan pertambangan di Indonesia. Melalui penelitiannya, disimpulkan bahwa ukuran perusahaan bukan faktor penentu dalam perilaku penghindaran pajak. Menurutnya, meski perusahaan besar memiliki lebih banyak modal dan akses pada sumber daya informasi, hal tersebut tidak menjamin kepatuhan penuh terhadap peraturan pajak. Beberapa perusahaan besar justru mampu memanfaatkan keunggulan sumber

dayanya untuk mengatur beban pajak seminimal mungkin melalui berbagai celah kebijakan yang ada. Sebaliknya, perusahaan dengan skala usaha lebih kecil sering kali tidak memiliki kemampuan maupun pengetahuan untuk melakukan perencanaan pajak yang rumit, sehingga cenderung membayar pajak sesuai ketentuan.

Selain faktor ukuran, terdapat beberapa variabel lain yang dinilai lebih berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain kebijakan internal, integritas manajemen, sistem tata kelola yang diterapkan, pengawasan internal, serta pengaruh dari pihak eksternal seperti regulator atau tekanan dari investor. Faktor-faktor inilah yang sering kali menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan strategi kepatuhan perpajakan perusahaan.

Dari temuan ini, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat diambil. Bagi manajemen, hasil ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan pajak sebaiknya tidak hanya didasarkan pada skala usaha, melainkan pada komitmen perusahaan untuk beroperasi sesuai peraturan dan etika bisnis yang sehat. Bagi otoritas perpajakan, temuan ini menjadi dasar bahwa pengawasan harus dilakukan secara merata, tidak hanya terfokus pada perusahaan besar saja, tetapi juga pada perusahaan dengan aset sedang hingga kecil yang juga memiliki peluang melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penghindaran pajak adalah persoalan kompleks yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui satu variabel,

melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, di masa mendatang diharapkan ada penelitian lanjutan yang dapat menggabungkan lebih banyak variabel pendukung agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu perilaku penghindaran pajak di perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis, variabel kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional cenderung menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, oleh lembaga seperti perusahaan investasi atau lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap manajemen, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengendalian penghindaran pajak terbilang cukup kuat. Keberadaan investor institusional mampu menjadi alat kontrol eksternal yang mendorong perusahaan bertindak lebih transparan dan patuh pada aturan pajak. Temuan ini menguatkan hasil beberapa penelitian sebelumnya dan menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tetap menjadi aspek penting dalam pengawasan tata kelola perusahaan, khususnya di Indonesia.
3. Diketahui bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersamaan (simultan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

penghindaran pajak. Hal ini tercermin dari hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,076, yang berarti lebih besar dari batas signifikan 0,05. Demikian, jika kedua variabel diuji secara bersama, belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak secara menyeluruh dalam sampel penelitian ini.

Secara garis besar, penelitian ini memberikan insight baru bahwa dalam upaya menekan penghindaran pajak, keberadaan kepemilikan institusional ternyata lebih berperan dibandingkan ukuran perusahaan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi manajer, investor, maupun pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan struktur kepemilikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang laporan keuangannya tidak dapat diakses secara publik atau formatnya tidak dapat dibaca dengan jelas, sehingga data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh secara lengkap.
2. Sebagian besar perusahaan pertambangan mengalami kerugian selama periode penelitian, yang disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas kondisi keuangan perusahaan dan berdampak pada perhitungan variabel penghindaran pajak.

3. Jumlah Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu hanya 11 perusahaan dari total 65 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan ini disebabkan oleh keterbatasan data yang tersedia dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan oleh peneliti.

5.3 Saran

Peneliti menyusun beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut:

1. Karena masih ada beberapa laporan keuangan perusahaan yang tidak dapat diakses secara publik atau formatnya sulit dibaca, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sumber data sekunder yang lebih lengkap dan terpercaya, seperti database dari BEI atau platform penyedia data keuangan lainnya. Selain itu, penting juga untuk melakukan pengecekan lebih awal terhadap kelengkapan dan keterbacaan format data agar proses pengolahan data tidak terhambat di tengah penelitian.
2. Beberapa perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama masa pandemi COVID-19 bisa memengaruhi hasil penelitian, terutama dalam menghitung penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian hingga tahun-tahun setelah pandemi, agar kondisi keuangan perusahaan yang diteliti lebih stabil dan hasilnya lebih akurat.

3. Jumlah sampel yang terbatas juga menjadi salah satu kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak perusahaan agar hasilnya bisa menggambarkan kondisi yang lebih umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). Fundamentals of financial management (Dasar-dasar Manajemen Keuangan). In *Engineering and Process Economics* (Vol. 3, Issue 3).
- Darmawan Putra, D. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.21632/saki.1.1.1-24>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Ma'sum, M. A., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>
- Mangoting, Y., Charysta, V., Martina, D., & Fransiska, S. (2019). Transparency as a Way to Anticipate Tax Avoidance through Corporate Social Responsibility. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 15–25. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>
- Nanda rahayu, & Agus wahyudi. (2024). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 94–108. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1078>
- Novari, P. M., & Lestari, dan P. V. (2016). PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Mempertahankan kontinuitas perusahaan adalah elemen penting yang harus dipertahankan oleh perusahaan , terutama men. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(9), 5671–5694.
- Ramdan Mustofa, I., & Mabrur, A. (2022). The effect of tax avoidance and

- corporate governance on the annual report's readability. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 103–115.
<https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i2.y2022.p103-115>
- Ratnasaria, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 9(1), 1–10.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>
- Siregar, N.P, S. V., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Sna Viii, September*, 475–490.
- Sudjinan, Judijanto, L., & Wijaya, I. K. K. (2024). The Influence Of Institutional Ownership On Company Financial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 435–440.
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). Fundamentals of financial management (Dasar-dasar Manajemen Keuangan). In *Engineering and Process Economics* (Vol. 3, Issue 3).
- Darmawan Putra, D. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–24.
<https://doi.org/10.21632/saki.1.1.1-24>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Ma'sum, M. A., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>
- Mangoting, Y., Charysta, V., Martina, D., & Fransiska, S. (2019). Transparency as a Way to Anticipate Tax Avoidance through Corporate Social Responsibility. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 15–25.

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>

- Nanda rahayu, & Agus wahyudi. (2024). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 94–108.
<https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1078>
- Novari, P. M., & Lestari, dan P. V. (2016). PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Mempertahankan kontinuitas perusahaan adalah elemen penting yang harus dipertahankan oleh perusahaan , terutama men. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(9), 5671–5694.
- Ramdan Mustofa, I., & Maburur, A. (2022). The effect of tax avoidance and corporate governance on the annual report's readability. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi* , 7(2), 103–115.
<https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i2.y2022.p103-115>
- Ratnasaria, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 9(1), 1–10.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>
- Siregar, N.P, S. V., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Sna Viii, September*, 475–490.
- Sudjinan, Judijanto, L., & Wijaya, I. K. K. (2024). The Influence Of Institutional Ownership On Company Financial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 435–440.
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	27 Nov 1997
2	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk	20 Mar 2002
3	DKFT	PT Central Omega Resources Tbk	21 Nov 1997
4	ELSA	PT Elnusa Tbk	2 Jun 2008
5	IFSH	PT Ifishdeco Tbk	12 Jun 2019
6	MITI	PT Mitra Investindo Tbk	16 Jul 1997
7	NICL	PT PAM Mineral Tbk	21 Dec 2021
8	RMKE	PT RMK Energy Tbk	7 Jun 2018
9	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco Tbk	7 Dec 2006
10	SICO	PT Sigma Energy Compressindo Tbk	20 Aug 2019
11	SMMT	PT Golden Eagle Energy Tbk	12 Jan 2007
12	SURE	PT Super Energy Tbk	18 Nov 2018
13	TINS	PT Timah Tbk	19 Oct 1995
14	WOWS	PT Ginting Jaya Energi Tbk	11 Aug 2019
15	ZINC	PT Kapuas Prima Coal Tbk	16 Oct 2017

Lampiran 2:

Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (Y) Tahun 2021-2023 (Dalam IDR)

No	Kode	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	ANTM	2021	181,769,000,000	3,043,509,000,000	0.0597
		2022	1,393,807,000,000	5,214,771,000,000	0.2673
		2023	776,833,000,000	3,854,481,000,000	0.2015
2	CITA	2021	100,967,322,506	669,312,473,099	0.1509
		2022	90,171,951,011	834,992,881,797	0.1080
		2023	57,163,579,047	775,768,358,438	0.0737
3	DKFT	2021	87,223,707,551	254,258,238,326	0.3431
		2022	41,672,102,331	68,838,213,417	0.6054
		2023	27,347,558,609	58,024,363,409	0.4713
4	ELSA	2021	121,900,000,000	230,752,000,000	0.5283
		2022	108,829,000,000	486,887,000,000	0.2235
		2023	143,480,000,000	646,611,000,000	0.2219
5	IFSH	2021	45,912,013,209	204,988,955,836	0.2240
		2022	53,643,258,405	243,411,687,527	0.2204
		2023	74,072,662,083	294,431,269,693	0.2516
6	MITI	2021	1,103,749,521	8,121,034,418	0.1359
		2022	3,502,590,963	18,848,484,833	0.1858
		2023	10,507,833,358	58,396,574,397	0.1799
7	NICL	2021	15,787,484,180	61,286,011,152	0.2576
		2022	52,219,388,667	202,425,389,706	0.2580
		2023	19,529,056,707	46,664,087,053	0.4185
8	RMKE	2021	56,644,502,470	254,785,807,495	0.2223
		2022	111,203,275,882	515,291,871,806	0.2158
		2023	86,831,469,252	395,770,833,948	0.2194
9	RUIS	2021	14,278,393,590	32,613,860,050	0.4378
		2022	18,685,145,002	38,796,496,871	0.4816
		2023	17,514,816,936	31,703,255,835	0.5525
10	SICO	2021	4,128,740,410	10,201,733,954	0.4047
		2022	3,115,608,866	14,495,001,399	0.2149
		2023	2,731,393,777	14,344,739,286	0.1904
11	SMMT	2021	8,044,239,351	258,001,970,758	0.0312
		2022	60,285,432,600	463,165,596,772	0.1302
		2023	24,079,751,706	280,054,340,392	0.0860
12	SURE	2021	5,541,550,451	76,050,295,479	0.0729
		2022	17,885,622,844	99,499,700,780	0.1798
		2023	29,287,762,476	171,628,917,855	0.1706

No	Kode	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
13	TINS	2021	425,449,000,000	1,728,705,000,000	0.2461
		2022	365,065,000,000	1,406,628,000,000	0.2595
		2023	2,974,000,000	446,698,000,000	0.0067
14	WOWS	2021	134,109,768	33,989,689,052	0.0039
		2022	265,293,553	27,927,084,305	0.0095
		2023	362,399,353	10,321,785,607	0.0351
15	ZINC	2021	35,922,948,515	113,118,604,985	0.3176
		2022	14,176,906,236	128,886,041,866	0.1100
		2023	3,434,986,591	23,218,229,313	0.1479

Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional (X1)

Tahun 2021-2023

No	Kode	Tahun	Jumlah Saham Institusional	Saham Yang Beredar	INST (%)
1	ANTM	2021	15,619,999,999	24,030,764,725	0.6500
		2022	15,619,999,999	24,030,764,875	0.6500
		2023	15,619,999,999	24,030,764,725	0.6500
2	CITA	2021	3,655,942,042	3,960,361,250	0.9231
		2022	3,656,042,942	3,960,361,250	0.9232
		2023	3,656,054,342	3,960,361,250	0.9232
3	DKFT	2021	3,369,240,378	5,638,246,600	0.5976
		2022	3,369,240,378	5,638,246,600	0.5976
		2023	3,464,903,878	5,638,246,600	0.6145
4	ELSA	2021	3,729,781,000	7,298,500,000	0.5110
		2022	3,729,781,000	7,298,500,000	0.5110
		2023	3,729,781,000	7,298,500,000	0.5110
5	IFSH	2021	15,619,999,999	24,030,764,725	0.6500
		2022	1,750,000,000	2,125,000,000	0.8235
		2023	1,700,000,000	1,922,977,600	0.8840
6	MITI	2021	287,947,994	564,620,320	0.5100
		2022	2,772,155,016	3,540,735,503	0.7829
		2023	2,772,155,016	3,540,734,500	0.7829
7	NICL	2021	7,662,500,000	9,662,500,000	0.7930
		2022	7,662,500,000	9,662,516,057	0.7930
		2023	7,662,500,000	10,653,644,907	0.7192
8	RMKE	2021	3,360,000,000	4,375,000,000	0.7680
		2022	3,360,000,000	4,375,000,000	0.7680
		2023	3,360,000,000	4,375,000,000	0.7680

No	Kode	Tahun	Jumlah Saham Institusional	Saham Yang Beredar	INST (%)
9	RUIS	2021	293,861,900	770,000,000	0.3816
		2022	296,188,700	770,000,000	0.3847
		2023	287,763,800	770,000,000	0.3737
10	SICO	2021	576,000,000	640,000,000	0.9000
		2022	576,000,000	910,000,000	0.6330
		2023	576,000,000	910,047,664	0.6329
11	SMMT	2021	2,635,030,695	3,150,000,000	0.8365
		2022	2,635,030,690	3,150,000,000	0.8365
		2023	3,090,530,067	3,150,000,000	0.9811
12	SURE	2021	1,382,440,643	1,497,576,771	0.9231
		2022	1,382,440,723	1,497,576,771	0.9231
		2023	1,382,440,693	1,497,576,771	0.9231
13	TINS	2021	4,841,053,951	7,447,753,484	0.6500
		2022	4,841,053,951	7,447,753,434	0.6500
		2023	4,841,053,951	7,447,753,434	0.6500
14	WOWS	2021	1,570,673,048	2,475,720,000	0.6344
		2022	1,570,673,088	2,475,720,000	0.6344
		2023	1,570,673,088	2,475,720,000	0.6344
15	ZINC	2021	2,792,147,269	25,250,000,000	0.1106
		2022	2,452,402,659	25,250,000,000	0.0971
		2023	2,470,509,344	25,250,000,000	0.0978

Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan (X2) Tahun 2021-2023

No	Kode	Tahun	Total Aset	Firm Size
1	ANTM	2021	32,916,154,000,000	31
		2022	33,637,271,000,000	31
		2023	42,851,329,000,000	31
2	CITA	2021	4,305,752,389,646	29
		2022	5,805,953,876,498	29
		2023	6,224,306,811,480	29
3	DKFT	2021	2,244,117,568,110	28
		2022	2,378,049,016,377	28
		2023	2,567,693,703,141	29
4	ELSA	2021	7,234,857,000,000	30
		2022	8,836,089,000,000	30
		2023	9,601,482,000,000	30
5	IFSH	2021	1,009,751,983,088	28

No	Kode	Tahun	Total Aset	Firm Size
		2022	1,094,941,798,908	28
		2023	1,072,483,806,616	28
6	MITI	2021	157,277,320,994	26
		2022	475,033,060,324	27
		2023	494,887,993,945	27
7	NICL	2021	417,347,357,927	27
		2022	600,874,396,472	27
		2023	856,837,978,400	27
8	RMKE	2021	1,400,383,315,761	28
		2022	1,676,835,378,416	28
		2023	2,247,694,981,530	28
9	RUIS	2021	1,297,577,363,103	28
		2022	1,267,549,300,138	28
		2023	1,341,729,318,010	28
10	SICO	2021	67,228,777,690	25
		2022	135,962,149,352	26
		2023	138,477,729,470	26
11	SMMT	2021	1,051,640,434,770	28
		2022	1,182,852,785,319	28
		2023	10,078,663,610,940	30
12	SURE	2021	997,439,630,855	28
		2022	961,382,427,552	28
		2023	983,779,522,672	28
13	TINS	2021	14,690,989,000,000	30
		2022	13,066,976,000,000	30
		2023	12,853,277,000,000	30
14	WOWS	2021	714,710,154,018	27
		2022	679,232,519,898	27
		2023	666,222,140,701	27
15	ZINC	2021	2,058,393,395,416	28
		2022	2,475,954,037,901	29
		2023	2,603,216,629,702	29

Lampiran 5 Hasil Olah Data dengan SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	45	.10	.98	.6665	.21798
Ukuran Perusahaan	45	25.00	31.00	28.2667	1.40454
Penghindaran Pajak	45	.00	.61	.2252	.14996
Valid N (listwise)	45				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

1. Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

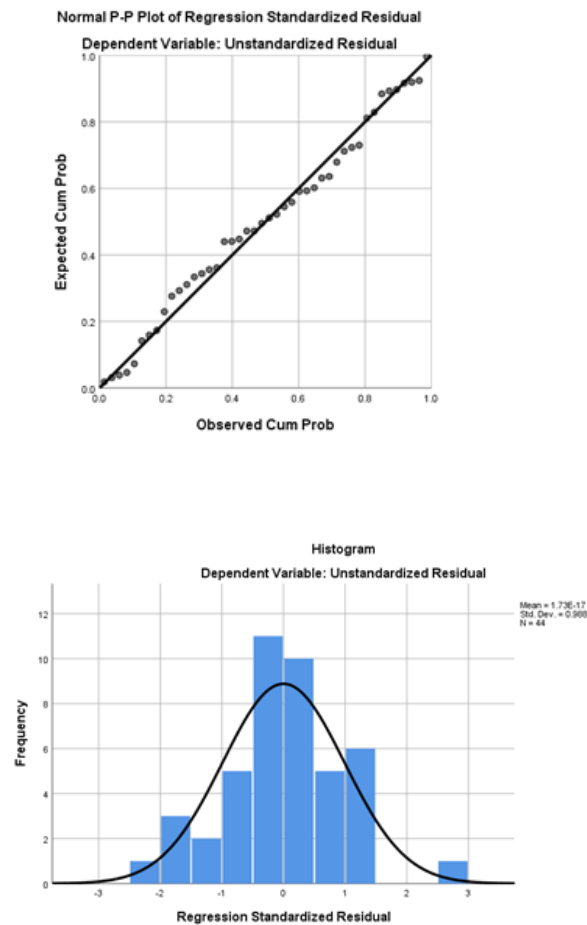
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14283967
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.079
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Normalitas dengan P-Plot of Regression Standardized Residual dan Histogram

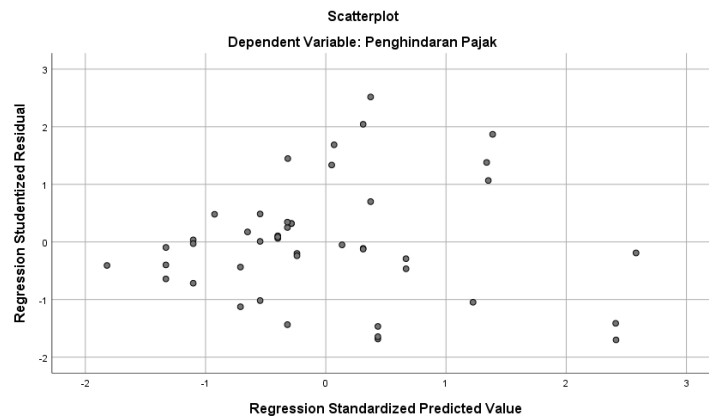


b. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Institusional	.967	1.034
	Ukuran Perusahaan	.967	1.034

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

c. Uji Heteroskedastisitas



d. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.304 ^a	.093	.049	.14620	.723

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Uji Autokorelasi dengan metode Cochare-Orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.343 ^a	.118	.075	.11367	1.859

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.209	.189		1.109
	Kepemilikan Institusional	-.244	.104	-.349	.024
	Ukuran Perusahaan	-.006	.018	-.054	.718

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.343 ^a	.118	.075	.11367	1.859

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

c. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.8 Hasil Uji Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	.071	2	.035	2.741
	Residual	.530	41	.013	
	Total	.601	43		

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

d. Uji Parsial UJI t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.209	.189		1.109	.274
	Kepemilikan Institusional	-.244	.104	-.349	-2.341	.024
	Ukuran Perusahaan	-.006	.018	-.054	-.364	.718

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak